



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOHAR ARIFIN**
2. Jabatan : **ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN LUAR NEGERI, KOMUNIKASI, DAN DIGITAL**
3. NHK : **279361**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 394.100.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP / SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 24.000.000
4. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
290.000.000
5. MOTOR, VESPA VESPA NEW PRIMAVERA 150 Tahun 2025,
HASIL SENDIRI Rp. 54.100.000
6. MOTOR, YAMAHA / 54 (CAST WHEEL) AT SEPEDA MOTOR R2
Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
7. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA LISTRIK LANKELEISI Tahun 2025,
HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 314.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 43.361.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 751.961.000

**III. HUTANG****Rp. 10.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 741.961.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.